DOKUMEN KEBUTUHAN INFORMASI

Oleh : Debi Tomika, SST

1. Kegiatan yang Dilakukan : Mencari Informasi kebutuhan pengguna data melalui survei kebutuhan data.
2. Latar Belakang :

Pemantauan pelayanan di PST BPS terutama dari segi ketersediaan data perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan. Oleh sebab itu, dirasa perlu menyelenggarakan suatu survei untuk mendapatkan bahan evaluasi mengenai kebutuhan dan kepuasan konsumen terhadap data dan informasi statistik serta pelayanan. Pemenuhan kebutuhan informasi untuk menyusun strategi bisnis instansi tersebut dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data.

1. Metodologi :

Pengumpulan informasi dilakukan dengan menyebar kuesioner survei kebutuhan data tahun 2021 kepada 31 responden. Responden merupakan mahasiswa, dosen, instansi, dan pengguna data dengan beragam latar belakang lainnya.

1. Desain Kuesioner :

Terlampir

1. Hasil Pencarian Informasi :

Sebanyak 7,04 persen responden tidak berhasil memperoleh data yang diperoleh di BPS Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan 92,96 persen menyatakan data yang diperoleh sudah sesuai. Faktor yang menyebabkan data tidak diperoleh umumnya disebabkan oleh data yang diperlukan tidak dapat digantikan dengan data lain sebagai pendekatan/proksi dari data tersebut dan juga level data yang tidak tersedia. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa data yang disediakan oleh BPS Kabupaten Kuantan Singingi masih belum lengkap dan belum mampu memenuhi seluruh keinginan pengguna data.

Berikut beberapa kategori data yang diperlukan namun banyak yang menganggap belum tersedia oleh pengguna data pada layanan BPS Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya :

1. Data PDRB menurut lapangan usaha/pertumbuhan ekonomi level kabupaten/kota triwulanan.
2. Data kemiskinan level kecamatan.
3. Data ketenagakerjaan level kecamatan.
4. Data produksi pertanian dan perkebunan pada level desa/kelurahan.
5. Data Indeks Harga Konsumen bulanan level kabupaten/kota.

Terkait ketiadaan data tersebut diatas maka perlu dicarikan variabel/indikator pengganti yang dapat digunakan sebagai proksi yang mampu menjelaskan kondisi data yang dicari. Mengingat BPS Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan survei diluar survei yang telah ditentukan oleh BPS RI. Meskipun demikian, BPS Kabupaten Kuantan Singingi tetap memiliki semangat untuk menjadi rujukan utama bagi pengguna data, sehingga diperlukan langkah koordinasi ke OPD terkait kebijakan sharing data yang dimiliki oleh OPD.

Demikian laporan ini dibuat, semoga bermanfaat.